

STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN PETANI SWADAYA DALAM MANAJEMEN RANTAI PASOK KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN MELALUI SERTIFIKASI INDONESIA SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO)

Hananto Maryan Wiguna¹, Sir Khalifatullah Ermaya²
ryan.seduduk@gmail.com¹, sir@upy.ac.id²
Universitas PGRI Yogyakarta

Abstrak

Industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor strategis bagi perekonomian Indonesia dengan kontribusi devisa mencapai US\$22-39 miliar dalam lima tahun terakhir. Namun, tantangan keberlanjutan lingkungan dan sosial yang dihadapi industri ini menuntut adopsi praktik berkelanjutan melalui sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Petani swadaya sebagai bagian penting dalam rantai pasok kelapa sawit menghadapi berbagai keterbatasan dalam mengimplementasikan praktik berkelanjutan dan memperoleh sertifikasi ISPO. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi penguatan kelembagaan petani swadaya dan dampaknya terhadap manajemen rantai pasok kelapa sawit berkelanjutan melalui adopsi sertifikasi ISPO. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada kelompok tani kelapa sawit di tiga provinsi utama penghasil kelapa sawit. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan petani melalui pembentukan koperasi dan kelompok tani yang solid dapat meningkatkan posisi tawar petani, memfasilitasi akses terhadap sertifikasi ISPO, dan memperbaiki kualitas manajemen rantai pasok. Strategi penguatan kelembagaan yang efektif meliputi peningkatan kapasitas organisasi, pengembangan kemitraan strategis, dan implementasi sistem manajemen informasi. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan yang mendukung inklusi petani swadaya dalam rantai pasok kelapa sawit berkelanjutan.

Kata Kunci: Kelembagaan Petani, Kelapa Sawit Berkelanjutan, ISPO, Rantai Pasok, Petani Swadaya.

ABSTRACT

The palm oil industry is one of the strategic sectors for Indonesia's economy, contributing foreign exchange of US\$22-39 billion in the last five years. However, environmental and social sustainability challenges faced by this industry demand the adoption of sustainable practices through Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) certification. Independent smallholders as an important part of the palm oil supply chain face various limitations in implementing sustainable practices and obtaining ISPO certification. This research aims to analyze strategies for strengthening independent smallholder farmer institutions and their impact on sustainable palm oil supply chain management through ISPO certification adoption. The research method uses a qualitative approach with case studies on palm oil farmer groups in three main palm oil-producing provinces. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The results show that strengthening farmer institutions through the formation of solid cooperatives and farmer groups can improve farmers' bargaining position, facilitate access to ISPO certification, and improve supply chain management quality. Effective institutional strengthening strategies include organizational capacity building, strategic partnership development, and information management system implementation. This research provides important contributions to policy development that supports the inclusion of independent smallholders in sustainable palm oil supply chains.

Keywords: Farmer Institutions, Sustainable Palm Oil, ISPO, Supply Chain, Independent Smallholders.

PENDAHULUAN

Industri kelapa sawit di Indonesia telah berkembang menjadi salah satu sektor ekonomi paling strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia menikmati posisi dominan dalam pasar global dengan nilai ekspor yang mencapai US\$22-39 miliar dalam lima tahun terakhir (Putri & Widianingsih, 2020). Sektor ini tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa negara, tetapi juga menyumbang rata-rata 61,87% terhadap total nilai ekspor kelompok komoditas industri makanan pada periode 2019-2023. Lebih dari itu, industri kelapa sawit memberikan kontribusi substansial terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dengan estimasi antara 2,5% hingga 4,5%, sekaligus menyerap tenaga kerja sekitar 16,2 juta pekerja (Rani, 2025).

Kompleksitas industri kelapa sawit tidak hanya terletak pada aspek ekonominya, tetapi juga pada struktur rantai pasoknya yang melibatkan berbagai aktor mulai dari petani swadaya, perusahaan perkebunan, hingga industri hilir. Petani swadaya memainkan peran vital dalam struktur ini, berkontribusi signifikan terhadap total produksi kelapa sawit nasional. Namun, posisi mereka dalam rantai pasok seringkali rentan karena keterbatasan akses terhadap teknologi, informasi pasar, dan modal kerja (Fitriani et al., 2022). Keterbatasan ini berdampak pada produktivitas yang relatif rendah dan posisi tawar yang lemah dalam sistem pemasaran, sehingga petani swadaya seringkali tidak memperoleh nilai tambah yang optimal dari usaha perkebunan mereka.

Tantangan keberlanjutan menjadi isu krusial yang dihadapi industri kelapa sawit Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Kritik internasional terkait dampak lingkungan seperti deforestasi, kehilangan keanekaragaman hayati, dan emisi gas rumah kaca telah memberikan tekanan besar pada sektor ini. Selain itu, isu-isu sosial seperti konflik lahan, pelanggaran hak asasi manusia, dan praktik perburuan yang tidak adil semakin memperketat pengawasan terhadap praktik industri kelapa sawit (Lauwinata & Susanto, 2024). Tekanan ini tidak hanya datang dari organisasi lingkungan dan masyarakat sipil, tetapi juga dari pasar global yang semakin menuntut produk berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Respons terhadap tantangan keberlanjutan ini telah mendorong pemerintah Indonesia untuk mengembangkan sistem sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai standar nasional yang wajib diterapkan oleh seluruh pelaku industri kelapa sawit. ISPO dirancang sebagai instrumen untuk memastikan bahwa produksi kelapa sawit di Indonesia memenuhi kriteria keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi (Wulandari, 2021). Implementasi ISPO diharapkan dapat memperbaiki citra industri kelapa sawit Indonesia di pasar global sekaligus memastikan keberlangsungan bisnis jangka panjang bagi seluruh pelaku industri, termasuk petani swadaya.

Namun, implementasi sertifikasi ISPO menghadapi tantangan serius, terutama di tingkat petani swadaya yang memiliki keterbatasan sumber daya dan kapasitas. Biaya sertifikasi yang relatif tinggi, kompleksitas prosedur, dan kurangnya pemahaman tentang standar berkelanjutan menjadi hambatan utama bagi petani swadaya untuk memperoleh sertifikasi ISPO (Siregar, 2023). Selain itu, struktur kelembagaan petani yang lemah mempersulit koordinasi dan kolaborasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan praktik berkelanjutan secara efektif. Kondisi ini berpotensi mengeksklusi petani swadaya dari rantai pasok berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat memperburuk kesenjangan ekonomi dan sosial di sektor perkebunan.

Penguatan kelembagaan petani swadaya muncul sebagai strategi kunci untuk mengatasi tantangan implementasi ISPO dan meningkatkan partisipasi mereka dalam rantai pasok kelapa sawit berkelanjutan. Kelembagaan yang kuat dapat memfasilitasi akses petani terhadap informasi, teknologi, pembiayaan, dan pasar, sekaligus meningkatkan kapasitas

mereka dalam mengadopsi praktik berkelanjutan (Pangestu et al., 2025). Melalui tindakan kolektif, petani dapat mencapai skala ekonomi yang diperlukan untuk memperoleh sertifikasi ISPO dengan biaya yang lebih terjangkau, sekaligus memperkuat posisi tawar mereka dalam rantai pasok. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi strategi penguatan kelembagaan yang efektif dan dampaknya terhadap manajemen rantai pasok kelapa sawit berkelanjutan melalui adopsi sertifikasi ISPO

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang strategi penguatan kelembagaan petani swadaya dan dampaknya terhadap manajemen rantai pasok kelapa sawit berkelanjutan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi komprehensif terhadap fenomena kompleks yang melibatkan interaksi antara faktor-faktor kelembagaan, ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam konteks industri kelapa sawit. Desain studi kasus memfasilitasi analisis mendalam terhadap praktik nyata penguatan kelembagaan dan implementasi sertifikasi ISPO di berbagai konteks geografis dan sosio-ekonomi. Metode ini juga memungkinkan identifikasi pola-pola unik dan pembelajaran yang dapat digeneralisasi untuk konteks yang lebih luas dalam industri kelapa sawit Indonesia.

Lokasi penelitian dipilih secara purposif di Perkumpulan Petani Swadaya Bangun Seranten (PPS-BS) di Desa Bangun Seranten, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Jambi, dan Koperasi Agro Tani Lestari di Kabupaten Sarolangun, Jambi, yang mewakili karakteristik geografis dan sosio-ekonomi yang beragam. Di Kriteria pemilihan lokasi meliputi keberadaan kelompok tani atau koperasi yang aktif, aksesibilitas lokasi untuk penelitian, dan kesediaan stakeholder lokal untuk berpartisipasi dalam penelitian. Pemilihan lokasi yang beragam ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang tantangan dan peluang penguatan kelembagaan petani swadaya di berbagai konteks regional.

Informan penelitian terdiri dari petani swadaya kelapa sawit, pengurus kelompok tani dan koperasi, penyuluh pertanian, perwakilan pemerintah daerah, akademisi, dan praktisi industri kelapa sawit. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan dengan topik penelitian. Total informan berjumlah 45 orang yang terdiri dari 18 petani swadaya, 12 pengurus organisasi petani, 6 penyuluh dan pejabat pemerintah, 5 akademisi dan peneliti, serta 4 praktisi industri. Keberagaman informan ini dimaksudkan untuk memperoleh perspektif yang komprehensif dari berbagai stakeholder yang terlibat dalam rantai pasok kelapa sawit berkelanjutan. Setiap informan dipilih berdasarkan kredibilitas, pengetahuan mendalam tentang topik penelitian, dan kesediaan untuk berbagi informasi secara terbuka.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur yang dikembangkan berdasarkan kerangka teoretis penelitian dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kategori informan. Setiap wawancara berlangsung antara 60-90 menit dan direkam dengan persetujuan informan untuk memastikan akurasi data. Observasi partisipatif dilakukan selama kegiatan kelompok tani, rapat koperasi, dan aktivitas perkebunan untuk memperoleh pemahaman kontekstual tentang dinamika kelembagaan dan praktik manajemen rantai pasok. Analisis dokumen mencakup review terhadap dokumen kelembagaan, laporan keuangan, sertifikat ISPO, dan kebijakan terkait yang relevan dengan penelitian.

Analisis data menggunakan teknik analisis tematik yang melibatkan proses kodifikasi, kategorisasi, dan interpretasi data secara sistematis. Proses analisis dimulai dengan transkripsi verbatim dari rekaman wawancara, kemudian dilakukan pengkodean terbuka untuk mengidentifikasi tema-tema awal yang muncul dari data. Pengkodean aksial dilakukan

untuk mengidentifikasi hubungan antar tema dan mengembangkan kategori yang lebih abstrak. Pengkodean selektif digunakan untuk mengintegrasikan semua kategori di sekitar tema sentral penelitian. Software NVivo 12 digunakan untuk memfasilitasi proses analisis dan memastikan konsistensi dalam kodifikasi data. Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

Validitas dan reliabilitas penelitian dijamin melalui beberapa strategis. Member checking dilakukan dengan mengembalikan hasil analisis kepada informan kunci untuk memverifikasi akurasi interpretasi peneliti. Peer debriefing dilakukan melalui diskusi dengan supervisor dan rekan peneliti untuk memperoleh perspektif alternatif terhadap temuan penelitian. Audit trail dikembangkan untuk mendokumentasikan seluruh proses penelitian dari tahap pengumpulan data hingga analisis untuk memungkinkan verifikasi eksternal. Rich description digunakan dalam penulisan laporan untuk memberikan konteks yang memadai bagi pembaca dalam memahami temuan penelitian. Strategi-strategi ini memastikan bahwa temuan penelitian dapat dipercaya dan memiliki kredibilitas ilmiah yang tinggi.

Aspek etis penelitian dijamin melalui penerapan prinsip-prinsip etika penelitian yang ketat. Informed consent diperoleh dari semua informan sebelum pengumpulan data dengan menjelaskan tujuan penelitian, prosedur, risiko dan manfaat, serta hak informan untuk mengundurkan diri kapan saja. Anonymity dan confidentiality dijaga dengan menggunakan pseudonym dalam laporan penelitian dan menyimpan data dengan aman. Beneficence dipastikan dengan memberikan feedback hasil penelitian kepada komunitas yang diteliti dan merekomendasikan intervensi yang dapat bermanfaat. Non-maleficence dijamin dengan memastikan bahwa penelitian tidak menimbulkan kerugian bagi informan atau komunitas yang diteliti. Seluruh protokol etis telah mendapat persetujuan dari komite etik institusi sebelum pelaksanaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Kelembagaan Petani Swadaya Kelapa Sawit

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan petani swadaya kelapa sawit di Indonesia memiliki karakteristik yang beragam, mulai dari kelompok tani informal hingga koperasi yang telah berbadan hukum. Sebagian besar organisasi petani yang ditemui dalam penelitian ini berupa kelompok tani dengan struktur organisasi sederhana yang dibentuk berdasarkan kedekatan geografis dan hubungan sosial yang telah terjalin lama di tingkat komunitas. Kelompok-kelompok ini umumnya memiliki anggota antara 15-30 petani dengan kepemilikan lahan rata-rata 2-5 hektar per petani. Struktur kepemimpinan biasanya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih berdasarkan kepercayaan dan pengalaman dalam usaha perkebunan kelapa sawit. Meskipun struktur organisasinya sederhana, kelompok-kelompok ini telah menjalankan fungsi dasar seperti koordinasi kegiatan panen, pembelian input produksi secara kolektif, dan berbagi informasi pasar (Pangestu et al., 2025).

Tingkat formalisasi kelembagaan petani bervariasi signifikan antar lokasi penelitian, dengan beberapa organisasi telah memiliki status badan hukum sementara yang lain masih beroperasi secara informal. Organisasi petani yang lebih formal umumnya memiliki struktur manajemen yang lebih kompleks dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Mereka juga memiliki sistem administrasi yang lebih tertib, termasuk pencatatan keuangan, dokumentasi kegiatan, dan sistem pelaporan kepada anggota dan stakeholder eksternal. Namun, formalisasi ini juga membawa tantangan baru berupa peningkatan beban administratif dan kebutuhan akan kapasitas manajemen yang lebih tinggi. Beberapa organisasi petani mengalami kesulitan dalam mengelola aspek administratif ini karena

keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan manajemen organisasi yang memadai.

Kapasitas kelembagaan petani dalam menjalankan fungsi-fungsi strategis seperti perencanaan bisnis, manajemen keuangan, dan pengembangan kemitraan masih relatif terbatas. Sebagian besar organisasi petani masih fokus pada fungsi-fungsi dasar dan belum mengembangkan kapasitas untuk aktivitas yang lebih kompleks seperti pengembangan produk, riset pasar, atau negosiasi kontrak jangka panjang. Keterbatasan ini tercermin dari rendahnya tingkat diversifikasi kegiatan organisasi dan ketergantungan yang tinggi pada dukungan eksternal untuk pengembangan program-program baru. Namun, terdapat beberapa organisasi petani yang telah menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik dengan mengembangkan unit usaha baru seperti pengadaan input produksi, jasa angkutan, dan bahkan pengolahan produk sampingan kelapa sawit.

Dinamika internal kelembagaan petani menunjukkan pentingnya faktor kepemimpinan dan partisipasi anggota dalam menentukan efektivitas organisasi. Organisasi dengan kepemimpinan yang kuat dan visioner cenderung lebih berhasil dalam mengembangkan program-program inovatif dan mempertahankan kohesi anggota. Sebaliknya, organisasi dengan masalah kepemimpinan seringkali mengalami konflik internal dan penurunan partisipasi anggota yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Partisipasi aktif anggota juga menjadi faktor kunci, dengan organisasi yang memiliki tingkat partisipasi tinggi menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam berbagai indikator seperti peningkatan produktivitas, akses pasar, dan adopsi teknologi baru (Muflihani et al., 2024).

Tantangan Implementasi Sertifikasi ISPO oleh Petani Swadaya

Implementasi sertifikasi ISPO oleh petani swadaya menghadapi hambatan fundamental yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya finansial dan teknis. Berdasarkan temuan penelitian, biaya implementasi sertifikasi ISPO untuk petani swadaya berkisar antara Rp 8-15 juta per kelompok, yang mencakup biaya audit, penyusunan dokumentasi, dan pelatihan. Biaya ini menjadi beban yang signifikan bagi petani dengan pendapatan rata-rata Rp 3-5 juta per bulan dari usaha kelapa sawit seluas 2-3 hektar. Selain aspek finansial, kompleksitas persyaratan teknis seperti penyusunan rencana manajemen kebun, sistem pencatatan produksi, dan dokumentasi praktik berkelanjutan menjadi tantangan tersendiri. Petani swadaya umumnya memiliki keterbatasan dalam literasi digital dan administrasi yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan dokumentasi yang ketat sesuai standar ISPO.

Kesenjangan pengetahuan dan kapasitas teknis petani swadaya tentang standar keberlanjutan menjadi hambatan utama dalam proses sertifikasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar petani (78%) belum memahami secara komprehensif tentang tujuh prinsip ISPO dan implikasinya terhadap praktik perkebunan mereka. Pemahaman yang terbatas ini tercermin dari rendahnya tingkat adopsi praktik berkelanjutan seperti penggunaan pupuk organik, konservasi air dan tanah, serta pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Kurangnya akses terhadap informasi dan pelatihan yang berkelanjutan memperburuk situasi ini, terutama di daerah-daerah terpencil dengan infrastruktur komunikasi yang terbatas. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam program sosialisasi dan edukasi tentang praktik berkelanjutan.

Fragmentasi rantai pasok dan lemahnya koordinasi antar stakeholder menjadi tantangan struktural dalam implementasi sertifikasi ISPO. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar petani swadaya menjual produk mereka melalui pedagang pengumpul yang tidak memiliki sistem ketertelusuran yang memadai. Hal ini menyulitkan verifikasi terhadap asal-usul produk dan kepatuhan terhadap standar ISPO sepanjang rantai pasok. Selain itu, kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga pendukung seperti dinas pertanian, penyuluh, dan lembaga sertifikasi menciptakan tumpang tindih program dan inefisiensi dalam

pemberian bantuan teknis. Kondisi ini memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan semua stakeholder dalam satu platform koordinasi yang efektif.

Inkonsistensi dalam implementasi kebijakan dan dukungan pemerintah juga menjadi tantangan yang signifikan. Meskipun sertifikasi ISPO bersifat wajib, enforcement di tingkat lapangan masih lemah, terutama untuk petani swadaya yang memiliki skala usaha kecil. Perbedaan interpretasi standar antar auditor dan lembaga sertifikasi menciptakan ketidakpastian bagi petani dalam mempersiapkan proses sertifikasi. Selain itu, program bantuan pemerintah untuk mendukung implementasi ISPO seringkali tidak berkelanjutan dan tidak terintegrasi dengan program pembangunan pertanian lainnya. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi kebijakan yang lebih komprehensif dan konsisten dalam mendukung implementasi sertifikasi ISPO oleh petani swadaya.

Strategi Penguatan Kelembagaan Petani Swadaya

Strategi penguatan kapasitas organisasi menjadi fondasi utama dalam meningkatkan efektivitas kelembagaan petani swadaya. Penelitian menunjukkan bahwa program pelatihan manajemen organisasi yang komprehensif dapat meningkatkan kinerja kelembagaan secara signifikan. Program ini mencakup pelatihan kepemimpinan, manajemen keuangan, perencanaan strategis, dan sistem administrasi yang efektif. Implementasi sistem manajemen kinerja berbasis indikator juga terbukti membantu organisasi petani dalam melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Selain itu, pengembangan mekanisme akuntabilitas internal melalui sistem pelaporan dan audit internal dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan anggota terhadap pengurus organisasi. Strategi ini memerlukan dukungan berkelanjutan dari pihak eksternal, terutama dalam fase awal implementasi hingga organisasi mencapai tingkat kemandirian yang memadai.

Pengembangan kemitraan strategis dengan berbagai stakeholder menjadi kunci untuk meningkatkan akses petani swadaya terhadap sumber daya dan pasar. Kemitraan dengan perusahaan perkebunan besar melalui skema plasma atau contract farming dapat memberikan akses terhadap teknologi, input produksi, dan pasar yang stabil. Kolaborasi dengan lembaga keuangan untuk mengembangkan produk pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha perkebunan kelapa sawit dapat mengatasi keterbatasan modal kerja petani. Kemitraan dengan institusi pendidikan dan penelitian memfasilitasi transfer teknologi dan pengetahuan terbaru tentang praktik berkelanjutan. Selain itu, kerjasama dengan organisasi non-pemerintah dan donor internasional dapat menyediakan dukungan teknis dan finansial untuk program-program pengembangan kapasitas. Keberhasilan kemitraan ini memerlukan desain yang hati-hati dengan pembagian risiko dan manfaat yang adil bagi semua pihak.

Implementasi sistem manajemen informasi yang terintegrasi menjadi strategi penting untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan organisasi petani. Sistem ini mencakup platform digital untuk pencatatan produksi, manajemen keuangan, monitoring kualitas, dan komunikasi dengan anggota. Penggunaan teknologi mobile dan aplikasi sederhana dapat memfasilitasi adopsi sistem ini oleh petani dengan keterbatasan literasi digital. Integrasi dengan sistem informasi pasar memungkinkan petani untuk memperoleh informasi harga yang akurat dan real-time, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam timing penjualan. Sistem manajemen informasi juga memfasilitasi ketertelusuran produk yang diperlukan untuk sertifikasi ISPO dan akses pasar premium. Implementasi sistem ini memerlukan investasi awal yang signifikan, tetapi manfaat jangka panjangnya dapat memberikan return yang menguntungkan bagi organisasi petani.

Strategi diversifikasi kegiatan usaha menjadi pendekatan penting untuk meningkatkan keberlanjutan finansial organisasi petani dan mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan. Pengembangan unit usaha baru seperti pengadaan input produksi, jasa transportasi, dan pengolahan produk sampingan dapat meningkatkan nilai tambah dan

pendapatan organisasi. Beberapa organisasi petani telah berhasil mengembangkan usaha pengolahan limbah kelapa sawit menjadi pupuk organik dan pakan ternak, yang memberikan sumber pendapatan tambahan sekaligus mendukung praktik berkelanjutan. Diversifikasi ke sektor non-pertanian seperti jasa keuangan mikro dan perdagangan eceran juga dapat meningkatkan resiliensi organisasi terhadap fluktuasi harga komoditas. Strategi diversifikasi ini memerlukan analisis kelayakan yang cermat dan pengembangan kapasitas manajemen yang sesuai dengan karakteristik setiap jenis usaha baru yang dikembangkan.

Dampak Penguatan Kelembagaan terhadap Manajemen Rantai Pasok

Penguatan kelembagaan petani swadaya memberikan dampak positif yang signifikan terhadap posisi tawar mereka dalam rantai pasok kelapa sawit. Penelitian menunjukkan bahwa petani yang tergabung dalam organisasi yang kuat mampu memperoleh harga jual yang lebih tinggi rata-rata 8-15% dibandingkan dengan petani individual. Hal ini dicapai melalui kemampuan bernegosiasi secara kolektif dengan pedagang pengumpul dan akses langsung ke pabrik pengolahan. Organisasi petani yang solid juga dapat mengembangkan kontrak jangka panjang dengan pembeli, sehingga mengurangi risiko fluktuasi harga dan memberikan kepastian pendapatan. Selain itu, penguatan kelembagaan memungkinkan petani untuk mengakses pasar premium melalui sertifikasi ISPO dan standar keberlanjutan lainnya. Peningkatan posisi tawar ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi petani dalam hubungan dengan stakeholder lain dalam rantai pasok.

Kualitas manajemen rantai pasok mengalami peningkatan substansial melalui implementasi sistem koordinasi yang lebih baik antar anggota organisasi petani. Sistem perencanaan produksi yang terintegrasi memungkinkan optimalisasi jadwal panen dan penyediaan bahan baku yang konsisten kepada pembeli. Implementasi standar kualitas yang seragam melalui program pelatihan dan monitoring internal dapat meningkatkan konsistensi produk dan mengurangi rejection rate. Sistem logistik yang lebih efisien melalui penggunaan fasilitas bersama seperti Tempat Pengumpulan Sementara (TPS) dan transportasi kolektif dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi waktu. Selain itu, pengembangan sistem informasi yang terintegrasi memfasilitasi tracking dan tracing produk yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan ketertelusuran dalam sertifikasi keberlanjutan.

Adopsi teknologi dan inovasi dalam manajemen rantai pasok meningkat secara signifikan setelah penguatan kelembagaan petani. Organisasi petani yang kuat memiliki kapasitas untuk melakukan investasi kolektif dalam teknologi seperti mesin pengolahan, sistem irigasi, dan peralatan panen yang modern. Sharing economy dalam penggunaan teknologi mahal memungkinkan petani kecil untuk mengakses teknologi yang sebelumnya tidak terjangkau. Program transfer teknologi dari mitra strategis juga lebih efektif ketika diimplementasikan melalui organisasi petani yang memiliki sistem manajemen yang baik. Adopsi teknologi digital seperti aplikasi mobile untuk monitoring kebun dan sistem informasi pasar juga lebih mudah difasilitasi melalui program pelatihan berkelompok. Peningkatan adopsi teknologi ini berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi operasional yang signifikan.

Keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam manajemen rantai pasok mengalami peningkatan melalui implementasi praktik berkelanjutan secara kolektif. Organisasi petani yang kuat dapat mengembangkan program konservasi lingkungan yang lebih efektif melalui pendekatan landscape-level management. Program seperti konservasi sumber daya air, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pengelolaan limbah dapat diimplementasikan secara lebih efisien melalui tindakan kolektif. Aspek sosial seperti peningkatan kesejahteraan pekerja, program pendidikan anak, dan pemberdayaan perempuan juga dapat dikembangkan melalui program organisasi yang komprehensif. Implementasi sistem monitoring dan evaluasi dampak lingkungan dan sosial menjadi lebih feasible ketika dilakukan secara kolektif. Peningkatan kesadaran dan kapasitas anggota dalam praktik

berkelanjutan melalui program edukasi berkelanjutan juga memberikan dampak positif jangka panjang terhadap keberlanjutan rantai pasok.

Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan Implementasi

Kepemimpinan yang transformasional menjadi faktor kunci utama dalam keberhasilan penguatan kelembagaan petani swadaya. Penelitian menunjukkan bahwa organisasi dengan pemimpin yang memiliki visi jelas, kemampuan komunikasi yang baik, dan komitmen terhadap pengembangan organisasi cenderung lebih berhasil dalam mengimplementasikan program-program inovatif. Kepemimpinan yang efektif juga dicirikan oleh kemampuan dalam membangun konsensus, mengelola konflik, dan memotivasi partisipasi aktif anggota. Selain itu, kepemimpinan yang inklusif dan demokratis dapat meningkatkan rasa kepemilikan anggota terhadap organisasi dan program-program yang dikembangkan. Pengembangan kaderisasi kepemimpinan melalui program mentoring dan pelatihan kepemimpinan juga penting untuk menjamin keberlanjutan organisasi. Faktor kepemimpinan ini tidak hanya berlaku untuk pengurus organisasi, tetapi juga untuk champion atau opinion leader di tingkat komunitas yang dapat mempengaruhi adopsi praktik berkelanjutan.

Partisipasi aktif dan komitmen anggota merupakan fondasi yang menentukan efektivitas implementasi strategi penguatan kelembagaan. Tingkat partisipasi yang tinggi tercermin dari kehadiran anggota dalam pertemuan rutin, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan kontribusi dalam implementasi program organisasi. Komitmen anggota dapat ditingkatkan melalui transparansi dalam pengelolaan organisasi, distribusi manfaat yang adil, dan komunikasi yang efektif tentang tujuan dan strategi organisasi. Sistem insentif yang tepat juga dapat meningkatkan motivasi anggota untuk berpartisipasi aktif dalam program organisasi. Selain itu, pengembangan rasa kebersamaan dan identitas kolektif melalui kegiatan sosial dan budaya dapat memperkuat kohesi anggota. Mekanisme feedback dan evaluasi yang melibatkan anggota juga penting untuk memastikan bahwa program organisasi sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi anggota.

Dukungan kebijakan dan regulasi yang kondusif dari pemerintah menjadi enabling factor yang sangat penting dalam keberhasilan penguatan kelembagaan petani. Kebijakan yang mendukung meliputi insentif fiskal untuk organisasi petani, bantuan teknis untuk pengembangan kapasitas, dan akses terhadap program-program pemerintah. Regulasi yang jelas dan konsisten dalam implementasi sertifikasi ISPO juga dapat memberikan kepastian bagi petani dalam melakukan investasi untuk memenuhi standar keberlanjutan. Selain itu, kebijakan yang mendorong kemitraan antara sektor publik dan swasta dapat memfasilitasi akses petani terhadap teknologi dan pasar. Desentralisasi program pembangunan pertanian ke tingkat daerah juga dapat meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan spesifik petani di setiap daerah. Koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah dalam implementasi program juga penting untuk menghindari duplikasi dan memastikan efektivitas program.

Akses terhadap sumber daya eksternal seperti pembiayaan, teknologi, dan pasar menjadi faktor kunci yang menentukan sustainability dari program penguatan kelembagaan. Diversifikasi sumber pembiayaan melalui kombinasi bantuan pemerintah, pinjaman komersial, dan investasi swasta dapat meningkatkan keberlanjutan finansial organisasi petani. Kemitraan dengan institusi penelitian dan pendidikan dapat memfasilitasi akses terhadap teknologi dan inovasi terbaru. Pengembangan jaringan dengan organisasi petani lain dan asosiasi industri dapat memperluas akses terhadap informasi dan peluang bisnis. Selain itu, integrasi dengan platform digital dan e-commerce dapat membuka akses terhadap pasar yang lebih luas. Capacity building untuk mengakses dan mengelola sumber daya eksternal juga penting untuk memastikan bahwa organisasi petani dapat memanfaatkan peluang yang tersedia secara optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi strategis perlu diimplementasikan untuk mengoptimalkan penguatan kelembagaan petani swadaya kelapa sawit. Pertama, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang lebih terintegrasi dan konsisten dalam mendukung penguatan kelembagaan petani, termasuk alokasi anggaran khusus untuk program capacity building, insentif fiskal untuk organisasi petani yang memperoleh sertifikasi ISPO, dan simplifikasi prosedur sertifikasi untuk petani swadaya. Kedua, perlu dikembangkan platform koordinasi multi-stakeholder di tingkat nasional dan daerah untuk memfasilitasi sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam mendukung penguatan kelembagaan petani. Ketiga, pengembangan sistem pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan melalui kombinasi sumber dana publik dan swasta, termasuk mekanisme blended finance dan impact investment yang dapat mendukung program jangka panjang.

Untuk sektor swasta dan industri kelapa sawit, rekomendasi meliputi pengembangan program kemitraan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dengan petani swadaya, investasi dalam infrastruktur teknologi informasi yang dapat diakses oleh petani kecil, dan integrasi petani swadaya dalam rantai pasok berkelanjutan melalui skema contract farming dan plasma yang lebih adil. Perusahaan juga perlu mengembangkan program corporate social responsibility yang fokus pada penguatan kelembagaan petani dan implementasi praktik berkelanjutan. Selain itu, industri perlu berkomitmen untuk memberikan premium price yang memadai untuk produk bersertifikat ISPO sebagai insentif bagi petani untuk mengadopsi praktik berkelanjutan.

Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi beberapa aspek yang belum sepenuhnya tercakup dalam penelitian ini. Pertama, studi longitudinal untuk menganalisis dampak jangka panjang dari program penguatan kelembagaan terhadap keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial petani swadaya. Kedua, penelitian komparatif dengan negara-negara produsen kelapa sawit lainnya untuk mengidentifikasi best practices dalam penguatan kelembagaan petani. Ketiga, analisis ekonomi yang mendalam tentang cost-benefit dari investasi dalam penguatan kelembagaan petani dari perspektif berbagai stakeholder. Keempat, penelitian tentang peran teknologi digital dan artificial intelligence dalam mendukung penguatan kelembagaan dan implementasi praktik berkelanjutan. Kelima, studi tentang dampak gender dan inklusi sosial dalam program penguatan kelembagaan petani kelapa sawit untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dinikmati secara adil oleh semua anggota masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2023. Jakarta: BPS.
- Bahri, S., & Malau, M. (2023). Analisis efektivitas kelembagaan petani dalam meningkatkan produktivitas kelapa sawit di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 7(2), 125-140.
- Directorate General of Estate Crops. (2023). Indonesian Palm Oil Statistics 2022. Jakarta: Ministry of Agriculture.
- Fitriani, F., Ambya, A., & Ismono, R.H. (2022). Lini hulu produksi sawit Indonesia: Perspektif rantai pasok. *Jurnal SEPA*, 19(1), 89-102. <https://jurnal.uns.ac.id/sepa/article/view/60992>
- Hadi, S., Rahman, A., & Sari, D.P. (2024). Implementasi teknologi blockchain dalam rantai pasok kelapa sawit berkelanjutan. *Jurnal Teknologi Agribisnis*, 8(1), 45-58.
- Hariyadi, P., Setiawan, B., & Wijaya, K. (2023). Dampak sertifikasi ISPO terhadap kesejahteraan petani swadaya di Kalimantan Tengah. *Indonesian Journal of Agricultural Economics*, 14(2), 78-95.
- Indonesian Palm Oil Association. (2024). Palm Oil Facts and Figures. Jakarta: GAPKI.

- Indrawati, R., & Kusuma, H. (2025). Strategi pemberdayaan ekonomi petani swadaya melalui koperasi kelapa sawit. *Jurnal Koperasi dan UKM*, 10(1), 23-36.
- Jannah, M., Sutrisno, A., & Pratiwi, L. (2024). Peran teknologi informasi dalam mendukung sertifikasi berkelanjutan kelapa sawit. *Jurnal Sistem Informasi Agribisnis*, 6(2), 67-82.
- Karuniasa, M., & Rahutomo, A.B. (2023). Peningkatan produktivitas lahan pekebun melalui sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, 21(1), 1-20. <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/akp/article/view/3306>
- Kementerian Pertanian. (2024). Pedoman teknis implementasi ISPO untuk petani swadaya. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Kusnandar, K., Fauzi, A.M., & Suharjito, D. (2023). Model kemitraan strategis dalam rantai pasok kelapa sawit berkelanjutan. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 20(3), 189-205.
- Lauwinata, L., & Susanto, H. (2024). Partisipasi masyarakat dalam implementasi ISPO: Analisis keberlanjutan, sosio-ekonomi, dan konflik di Kabupaten Merauke. *Journal of Law*, 15(2), 234-251. <https://pdfs.semanticscholar.org/f55c/d23192c39057680a310201adf3675908acdb.pdf>
- Muflihani, A.R., Mulyasari, G., & Yuliarso, M.Z. (2024). Analisis sistem agribisnis pada tanaman kelapa sawit rakyat. *Agricultural Review*, 8(1), 56-71. <https://ejurnal.unisan.ac.id/index.php/arview/article/view/1084>
- Nasution, E.W., & Ningsih, T. (2025). Optimalisasi manajemen rantai pasok dalam agribisnis: Studi kasus produksi kelapa sawit. *Jurnal TABELA*, 7(1), 112-128. <https://jurnal.ilmubersama.com/index.php/tabela/article/view/753>
- North, D.C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nurliza, N., & Dolorosa, E. (2021). Niat perilaku petani sawit swadaya dalam peningkatan usaha berkelanjutan di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal SEPA*, 17(2), 108-118. <https://jurnal.uns.ac.id/sepa/article/view/48546>
- Ostrom, E. (2009). A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. *Science*, 325(5939), 419-422.
- Pangestu, I.T., Kusnandar, K., & Fajarningsih, R.U. (2025). Strategi pengembangan agribisnis berbasis petani swadaya kelapa sawit. *Jurnal Agribios*, 23(1), 34-49. <https://unars.ac.id/ojs/index.php/agribios/article/view/5783>
- Pretty, J., & Ward, H. (2001). Social capital and the environment. *World Development*, 29(2), 209-227.
- Putri, S.Y., & Widianingsih, Y. (2020). Diplomasi ekonomi melalui petisi online di industri kelapa sawit Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 8(4), 45-62. <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/325>
- Rahman, F., & Santoso, P. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi praktik berkelanjutan pada petani kelapa sawit swadaya. *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, 24(1), 89-104.
- Rani, N. (2025). Dampak kelapa sawit dalam pembangunan berkelanjutan: Analisis kebijakan publik. *Jurnal Governansi*, 11(1), 78-95. <https://ojs.unida.ac.id/JGS/article/view/16314>
- Roundtable on Sustainable Palm Oil. (2023). *RSPO Impact Report 2023*. Kuala Lumpur: RSPO.
- Setiawan, A., Mulyani, S., & Hidayat, R. (2023). Efektivitas program pemerintah dalam mendukung sertifikasi ISPO petani swadaya. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 18(2), 156-173.
- Seuring, S., & Müller, M. (2008). From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management. *Journal of Cleaner Production*, 16(15), 1699-1710.
- Siregar, H. (2023). Pengaruh penerapan ISPO terhadap pendapatan petani kelapa sawit di Asahan. Tesis. Universitas Medan Area. <https://repository.uma.ac.id/handle/123456789/22794>
- Susanto, D., Wijayanti, M., & Kurniawan, B. (2024). Peran organisasi petani dalam meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit berkelanjutan. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 17(3), 234-249.
- Wahyudi, T., Jaya, H.N., & Ginting, E.L. (2025). Model bisnis inovatif untuk petani swadaya kelapa sawit dalam era digital. *Jurnal Inovasi Pertanian*, 24(1), 67-84.
- Wulandari, B.A.R. (2021). *SDGs dalam penguatan pembangunan kelapa sawit melalui ISPO*. Skripsi. Universitas Jember. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/104155>

Yusuf, M., & Hartono, S. (2024). Dampak perubahan iklim terhadap produktivitas kelapa sawit dan strategi adaptasi petani swadaya. *Jurnal Agroklimat*, 18(2), 145-162.